



RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah merupakan termasuk dalam unsur eksekutif dimana dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memuat sasaran kinerja yang ingin dicapai untuk pemenuhan target yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini juga berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini terdapat kekurangan , sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 , kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Agustus 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196606181990031011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN LALU.	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO	34
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah	34
3.3 Program Dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2021	42
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2020	15
2.	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	22
3.	Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	29
4.	Tabel 2.4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	33
5.	Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Mojokerto lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan.

Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacudiri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan RENJA, penyusunan rancangan awal RENJA, penyusunan rancangan RENJA, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir RENJA dan penetapan RENJA.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan, yang memuat misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Mojokerto dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu RENJA Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada setiap tahun anggaran. Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merumuskan program dan

kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (RENSTRA - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto) yang diformulasikan sesuaidengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan duniausaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah (lima tahun) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan (rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan instrumen kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi

pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, RENJA merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui OPD Pemerintah Kabupaten Mojokertoselama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA adalah :

1. Memberi pedoman dalam melaksanakan pengendalian, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pendapatandaerah;
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusanpilihan.

1.4. SistematikaPenulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.1 LatarBelakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2021.

BAB V.

PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh PD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. RENSTRA tersebut juga merupakan panduan Bapenda selaku PD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja Pendapatan Daerah tahun 2019 pada umumnya tercapai sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.1 Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPP sampai tahun berjalan 2020 dan realisasinya. Adapun capaian program kegiatan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 206.541.034,00 (88,19%)
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini di anggarkan Rp. 36.805.000,00 telah terealisasi Rp. 21.298.700,00(57,876 %)
 - c. Penyediaan Alat tulis kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 149.426.000,00 telah terealisasi Rp. 136.098.000,00(91,08 %)
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 322.825.000,00 telah terealisasi Rp. 321.038.050,00 (99,45 %)

- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 405.165.000,00 telah terealisasi Rp. 393.175.000,00 (97,04 %)
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesarRp. 116.300.000,00 telah terealisasi Rp. 116.000.000,00(100 %)
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.920.250,00 telah terealisasi sebesar Rp. 175.910.400,00 (99,99 %)
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 155.150.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 99.681.858,00 (64,25 %)
 - i. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 273.821.160,00telah terealisasi sebesar Rp. 256.813.000,00 (93,79 %)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Mebeleur Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 118.125.000,00 telah terealisasi sebesarRp. 116.750.000,00 (98,84 %)
 - b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 217.350.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 214.856.000,00 (98,85 %)
 - c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kedaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 238.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 237.556.332,00 (99,81 %)
 - d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 126.320.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 126.301.000,00 (99,99 %)
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.350.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 61.165.000,00 (96,55 %)

- b. Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.683.590,00 telah terealisasi sebesar Rp. 100.787.500,00 (99,12 %)
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja PD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.749.992,00 telah terealisasi sebesar Rp. 37.234.200,00 (96,09 %)
- 5) Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD
 - a. Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 541.081.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 438.760.117,00 (81,09 %)
 - b. Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 556.800.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 518.191.200,00 (93,07 %)
 - c. Penyusunan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 335.158.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 304.265.800,00 (90,78 %)
 - d. Pemeriksaan dan Monitoring Pajak/Retribusi Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 278.518.700,00 telah terealisasi sebesar Rp. 231.399.400,00 (83,08 %)
 - e. Peningkatan Administrasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 509.342.300,00 telah terealisasi sebesar Rp. 466.815.057,00 (91,65 %)
- 6) Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah
 - a. Operasional Pemungutan Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.146.919.900,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.135.013.717,00 (98,96 %)
 - b. Peningkatan dan Penerbitan Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.506.775.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.329.803.109,00 (92,94 %)

- c. Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.280.517.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.243.076.300,00 (97,08 %)
 - d. Pembuatan sarana baliho sosialisasi pajak Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 143.430.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 133.799.000,00 (93,29 %)
- 7) Program Peningkatan potensi dan Administrasi Pajak Daerah
- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.217.400.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.159.235.512,00 (95,22 %)
 - b. Pendataan Obyek Pajak Daerah Lainnya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.889.772.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.837.248.000,00 (97,22 %)
 - c. Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 748.400.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 379.546.200,00 (50,71 %)
 - d. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 541.528.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 486.408.800,00 (89,82 %)
 - e. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 235.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 212.780.000,00 (90.54 %)
 - f. Peningkatan Pengelolaan Pajak BPHTB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 116.300.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 105.800.000,00 (90.97 %)

2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019(n-2) adalah sebagai berikut :

a) Dari 7 Program dan 31 Kegiatan terdapat capaian realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan terdiri dari :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Pemeriksaan dan Monitoring Pajak/Retribusi Daerah
- Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan
- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

b) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 90 % meliputi:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Alat tulis kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Kedaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD
- 5) Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD
 - Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - Penyusunan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah
 - Peningkatan Administrasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- 6) Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah
 - Operasional Pemungutan Pajak Daerah
 - Peningkatan dan Penerbitan Pajak Daerah
 - Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah
 - Pembuatan sarana baliho sosialisasi pajak
- 7) Program Peningkatan potensi dan Administrasi Pajak Daerah
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah
 - Pendataan Obyek Pajak Daerah Lainnya
 - Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
 - Peningkatan Pengelolaan Pajak BPHTB

Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja, program dan kegiatan disebabkan karena :

- Seluruh program dan kegiatan mengacu pada DPA tahun berjalan dalam implementasinya mengacu pada indikator kinerja program dengan menggunakan indikator capaian program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016-2021.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal dan iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang optimal antar bidang /staf.
- Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto yang dapat difungsikan secara optimal.

- c) Dengan terpenuhinya target Renstra PD yang didasarkan realisasi program dan kegiatan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai dengan mekanisme tahapan penyusunan rencana kerja PD
- d) Belum tercapainya Target pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan penyesuaian dari belanja yang harus kita bayar.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, ialah terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi keuangan daerah.
- f) Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut dengan melakukan perubahan anggaran (PAPBD) jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program serta perlu dilakukan revisi terhadap indikator kinerja yang terdapat dalam renstra.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2019 (n-1) disesuaikan dengan Renstra PD baik dari Sasaran, Program dan Kegiatan serta anggaran yang masih bertumpuh pada Indikator Tahun sebelumnya. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 2.1
(Tabel T-C.29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah :
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 . 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4.01 . 4.04.08	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Capaian Penerimaan PAD	100%	115%	100%	107%	107%	100%	54,08%	54,08%
4.01 .4.04.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.01 .4.04.08 .01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
4.01 .4.04.08 .01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85 unit	85 unit	85 Unit	85 unit	100%	85 Unit	25 Unit	60%
4.01 .4.04.08 .01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	58 alat tulis	58 alat tulis	58 alat tulis	58 alat tulis	100%	58 alat tulis	58 alat tulis	100%
4.01 .4.04.08 .01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 percetakan	21 percetakan	21 percetakan	21 percetakan	100%	21 percetakan	21 percetakan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 .4.04.08 .01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis Peralatan kantor	5 Jenis Peralatan kantor	4 Jenis Peralatan kantor	5 Jenis Peralatan kantor	100%	4 Jenis Peralatan kantor	-4 Jenis Peralatan kantor	100%
4.01 .4.04.08 .01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
4.01 .4.04.08 .01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu makan tamu dan rapat yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
4.01 .4.04.08 .01 . 21	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
4.01 .4.04.08 .01 . 23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah jasa tenaga kerja kontrak yang tersedia	17 Orang	17 Orang	14 Orang	17 Orang	100%	14 Orang	14 orang	100%
4.01 .4.04.08 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %.	100 %.	100 %.	100 %.	100 %.	100 %.	25%	25%
4.01 .4.04.08 .02 .05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	26 unit	26 unit	-	-	-	-	-	
4.01 .4.04.08 .02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubel yang tersedia	2 janis	2 janis	3 Jenis Meubel	2 janis	100%	3 Jenis Meubel	3 Jenis Meubel	100%
4.01 .4.04.08 .02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
4.01 .4.04.08 .02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dinas operasional								
4.01 .4.04.08 .02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah waktu peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
4.01 .4.04.08 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai Dengan Tingkat Kedisiplinan Kedinasan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100 %.	100 %.	100 %.	100 %.	100 %.	100 %.	50%	50%
4.01 .4.04.08 .03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	60 Stel	60 Stel	60 Stel	60 Stel	100 %	-	-	0%
4.01 .4.04.08 .03 . 10	Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah	Jumlah karyawan yang mengikuti bimtek	-	-	3 Karyawan	-3 Karyawan	100 %	-	-	0%
4.01 .4.04.08 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Bapenda yang Disusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.01 .4.04.08 .06 . 05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	6 Dokumen	90%
4.04 .4.04.08 . 17	Program peningkatan dan pengembangan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	100%	112%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	pengelolaan keuangan daerah									
4.04 .4.04.08 .17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	Jumlah jenis pajak daerah dan reward kepada wajib pajak	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 32	Operasional Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah Wilayah Operasional Pemungutan Pajak	18 wilayah kecamatan	18 wilayah kecamatan				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 33	Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi PAD	483.033.385.770	555.880.357.834				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 34	Pemeliharaan Basis Data SismiOP PBB P2	Jumlah peta Sistem Informasi Geografis (SIG) yang terpelihara untuk sistem informasi dan manajemen obyek pajak (SismiOP) PBB-P2	39 Peta Blok 4.600 Jumlah OP	39 Peta Blok 4.600 Jumlah OP				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 35	Pemeliharaan Program Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah	6 Aplikasi	6 Aplikasi				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 36	Pendataan Obyek Pajak Daerah Lainnya	Jumlah potensi pajak daerah baru yang terdata	33.000.000.000	33.000.000.000				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 37	Peningkatan dan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah Obyek wajib Pajak Daerah yang tertibkan	810 Obyek Pajak	810 Obyek Pajak				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 38	Peningkatan Pengelolaan Adminitrasi Pajak Daerah	Jumlah SPPT,DHKP dan SSPD PBB-P2	Jumlah SPPT = 556.027 OP DHKP = 2.500 SSPD = 556.027	Jumlah SPPT = 556.027 OP DHKP = 2.500 SSPD = 556.027				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04 .4.04.08 .17 . 39	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Wajib pajak yang dapat pelayanan langsung	6500 wp	6500 wp				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 40	Penyusunan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah	Jumlah Keputusan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah baru dan perubahan yang di terbitkan	3 perbub	3 perbub				-		
4.04 .4.04.08 . 17 .41	Pendataan dan Penilaian Obyek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah obyek pajak PBB-P2 yang dilakukan pendataan dan penilaian	80 Obyek Pajak 13 Peta ZNT	80 Obyek Pajak 13 Peta ZNT				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 42	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah / Retribusi Daerah	Jumlah obyek wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang diperiksa/dimonitoring	10 Jenis Pajak dan 3 Retribusi	10 Jenis Pajak dan 3 Retribusi				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 50	Pembentukan Basis Data SismiOP PBB P2	Jumlah data base sistem informasi dan manajemen obyek pajak (SismiOP) PBB yang terbentuk	30 Peta Blok 25 Peta ZNT 7.000 Obyek Pajak SismiOP	30 Peta Blok 25 Peta ZNT 7.000 Obyek Pajak SismiOP				-		
4.04 .4.04.08 .17 . 56	Pembuatan Sarana Baliho Sosialisasi Pajak	Jumlah baliho sosialisasi pajak daerah	3 Unit	4 Unit						
4.04 .4.04.08 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Presentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	112%						
4.04 .4.04.08 .18 . 35	Peningkatan Administrasi dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pajak Daerah	48 Laporan Harian	48 Laporan Harian 12 Laporan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendapatan Daerah		12 Laporan Bulanan 4 Laporan Tahunan	Bulanan 4 Laporan Tahunan						
4.04 . 4.04.08 .18 . 54	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan penerimaan, piutang pajak daerah dan permohonan keberatan yang terlayani	480 Laporan Harian 24 Laporan Bulanan 8 Laporan Triwulanan 2 Laporan Tahunan	480 Laporan Harian 24 Laporan Bulanan 8 Laporan Triwulanan 2 Laporan Tahunan						
4.04 . 4.04.08.20	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	Tingkat Ketersediaan data proyeksi PAD	-	-	100 %	100 %	100 %			
4.04 . 4.04.08.20.01	Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah	-	-	498 milyar	522 milyar	105 %			
4.04 . 4.04.08.20.02	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak & Retribusi Daerah	Jumlah sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	3 aplikasi	3 aplikasi	100 %			
4.04 . 4.04.08.20.03	Penyusunan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah	Jumlah keputusan peraturan pajak/retribusi daerah baru dan perubahan(penyempurnaan) yang di terbitkan	-	-	3 perbup	3 perbup	100 %			
4.04 . 4.04.08.20.04	Pemeriksaan dan Monitoring pajak, retribusi Daerah	Jumlah obyek wajib pajak dan retribusi daerah yang diperiksa/dimonitoring	-	-	50 obyek pajak dan 5 retribusi daerah	50 obyek pajak dan 5 retribusi daerah	100 %			
4.04 .	Peningkatan Administrasi	Jumlah laporan hasil evaluasi	-	-	64 laporan 48	64 laporan 48	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.08.20.05	dan Evaluasi Pendapatan Daerah	pajak daerah			mingguan 12 bulanan 4 tribulan	mingguan 12 bulanan 4 tribulan				
4.04 . 4.04.08.21	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak daerah	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah	-	-	100 %	100 %	100 %			
4.04 . 4.04.08.21.01	Operasional Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah Wilayah Operasional Pemungutan Pajak	-	-	18 wilayah kecamatan	18 wilayah kecamatan	100 %			
4.04 . 4.04.08.22.02	Peningkatan dan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah objek wajib pajak daerah yang tertibkan	-	-	840 obyekt pajak	756 obyekt pajak	90 %			
4.04 . 4.04.08.23.03	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan penerimaan, piutang pajak daerah dan permohonan keberatan yang terlayani	-	-	627 berkas	627 berkas	100 %			
4.04 . 4.04.08.24.04	Pembuatan Sarana Baliho Sosialisasi Pajak	Jumlah baliho sosialisasi pajak daerah	-	-	2 Unit	3 Unit	150 %			
4.04 . 4.04.08.22	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	-	-	3 %	5 %	167 %			
4.04 . 4.04.08.22.01	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak daerah dan reward kepada wajib pajak	-	-	10 jenis pajak	-10 jenis pajak	100 %			
4.04 . 4.04.08.22.02	Pendataan Objek Pajak Daerah Lainnya	Jumlah potensi pajak daerah baru yang terdata	-	-	6 milyar	4 milyar	67 %			
4.04 . 4.04.08.22.03	Pendataan dan Penilaian Obyekt Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah obyekt pajak PBB-P2 yang dilakukan pendataan dan penilaian	-	-	85 obyekt pajak dan 13 peta ZNT	85 obyekt pajak dan 13 peta ZNT	100 %			
4.04 .	Peningkatan Pengelolaan	Jumlah SPPT, DHKP dan	-	-	561.350 obyekt	561.350 obyekt	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.08.22.04	Administrasi Pajak Daerah	SSPD PBB-P2			pajak	pajak				
4.04 . 4.04.08.22.05	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung	-	-	6.650 WP	6.000 WP	90 %			
4.04 . 4.04.08.22.06	Peningkatan Pengelolaan Pajak BPHTB	Jumlah capaian pajak BPHTB	-	-	100 %	100 %	100 %			
4.04.08.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Capaian Pajak daerah						100%	48%	48%
4.04.08.01.17.6 4	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah	Jumlah Capaian pajak daerah						304.200.000.000	147.488.539.10 7	48%
4.04.08.01.24	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	Tingkat Ketersediaan Data Proyeksi PAD						100%	50%	50%
4.04.08.01.24.0 1	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Potensi PAD						564.031.529.648	554.726.043.08 2	98%
4.04.08.01.24.0 4	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	Jumlah Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi daerah yang ditingkatkan						7 aplikasi	1 aplikasi	14%
4.04.08.01.24.0 5	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak daerah yang diperiksa/dimonitoring						50 Wajib pajak	10 Wajib pajak	20%
4.04.08.01.25	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah						80%	48%	60%
4.04.08.01.25.0	Operasional Pemungutan	Jumlah Capaian						92.000.000.000		51%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	dan Penertiban PBB P2	Penerimaan PBB P2							47.374.902.780	
4.04.08.01.25.02	Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya						242.200.000.000	100.113.636.327	41%
4.04.08.01.25.03	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan Administrasi Penerimaan Pajak Daerah						527 laporan	264 laporan	50%
4.04.08.01.26	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah						4%	2%	50%
4.04.08.01.26.01	Peningkatan Pendataan/Penilaian PBB P2 dan Pengelolaan BPHTB	Jumlah Potensi PBB P2 dan BPHTB						166.400.000.000	162.000.000.000	97%
4.04.08.01.26.03	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung						6.650 Wajib Pajak	2.260 Wajib Pajak	34%
4.04.08.01.26.04	Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Potensi pajak daerah lainnya						181.168.000.000	180.100.000.000	99%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menghendaki terjadinya perubahan paradigma birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan Kinerja Birokrasi dalam melayani publik secara total melalui aspek responsibilitas. Para pengemban tugas pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pihak yang dilayani masyarakat.

Tugas pemerintah dalam melayani kepentingan publik dihadapkan pada beragam kebutuhan dan jenis pelayanan serta tanggungjawab mensejahterakan masyarakat dengan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Kurangnya optimalisasi dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadikan sarana intropeksi ke perbaikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat menuju pelayanan prima.

Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto hingga Tahun 2019 telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak diantaranya dengan :

1. Sistem Aplikasi pembayaran pajak dengan Bank Jatim, Mandiri, BRI, BNI, Alfa Mart, Indomaret, Traveloka, Link Aja;
2. Sistem Informasi pajak Daerah Online (Si Panjol);
3. Host to Host Sistem data dengan Dispenduk Capil dan Kantor Pertanahan ;
4. Sistem Aplikasi Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.2
(Tabel T.C.30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisis
			Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
1	Persentase capaian penerimaan PAD	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	113.02 %	107.59%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa " *pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah*" sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Kabupaten Mojokerto. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- i. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya Dinas Teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
- b. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
- c. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- d. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu
- e. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;
- b. Melakukan optimalisasi penagihan yang didahului kegiatan-kegiatan pengendalian
- c. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Daerah;
- d. Mencari dan menggali sumber-sumber potensi penerimaan baru yang bekerjasama dengan kalangan akademis (pihak ketiga),
- e. Dalam hal menggali sumber keuangan sendiri, dilakukan pendekatan dengan instansi vertikal guna mengambil/mengalihkan penerimaan yang selama ini merupakan penerimaan pusat menjadi penerimaan daerah.
- f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Propinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

- g. Penerapan pelaporan keuangan untuk jenis pajak hotel dan restoran telah secara online dengan menggunakan alat elektronik (tapping box).
- h. Optimalisasi peranan PPNS Perpajakan dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui Pendekatan Persuasif.
- i. Optimalisasi pelaksanaan Pemeriksaan pembayaran Pajak
- j. Pelaksanaan law enforcement penagihan pajak dengan surat paksa oleh juru sita.
- k. Penyempurnaan ketentuan teknis penagihan pajak dengan melakukan konsultasi kepada instansi pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas :
- 2) Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita

dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

- 3) Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Beberapa sistem aplikasi (*software*) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi (*host to host*)
- 5) Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya yang masih belum optimal;
- 6) Belum optimalnya distribusi penempatan petugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto secara merata dibandingkan dengan jumlah titik operasional pelayanan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan;

Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas :

- 1) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
- 2) Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

3. Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada peluang dan juga tantangan yang harus diambil. Peluang dan Tantangan tersebut harus bisa menjadi tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah, dimana peluang dan tantangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Tantangan yang harus dihadapi terdiri atas :

- a) Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Mojokerto, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
- b) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

2) Peluang yang dihadapi terdiri atas :

- a) Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- b) Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- c) Kondisi sosial di Kabupaten Mojokerto cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- d) Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola

pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepadapublik.

- e) Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.
- f) Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

(Tabel T.C.31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase indikator program Badan Pendapatan Daerah	100	3.343.978.069	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase indikator program Badan Pendapatan Daerah	100	3.343.978.069	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bapenda	Bapenda	Jumlah Dokumen	7	60.000.000	
						Pengelolaan Administrasi Keuangan bapenda	Bapenda	Jumlah Laporan	181	50.000.000	
						Ketatausahaan dan Kepegawaian Bapenda	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12	3.233.978.069	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bapenda	Tingkat Capaian Pajak Daerah	100	1.000.000.000	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bapenda	Tingkat Capaian Pajak Daerah	100	1.000.000.000	
						Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pajak daerah	Bapenda	Jumlah Capaian Pajak daerah	347.568.000.000 ,-	1.000.000.000	
3	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	Bapenda	Tingkat Ketersediaan Data Proyeksi PAD	100	2.329.330.000	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	Bapenda	Persentase Peningkatan Potensi PAD	2	2.329.330.000	Perubahan Pada Indikator dan Target Program
						Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bapenda	- Jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah	586.592.790.833 ,-	1.017.265.000	
								- Jumlah peraturan pajak yang disempurnakan	2		
						Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	Bapenda	-Jumlah sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah yang ditingkatkan	8	707.065.000	
								-Jumlah laporan administrasi penerimaan PAD	64		
						Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah wajib Pajak Daerah yang di periksa/dimonitoring	50	605.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak daerah	Bapenda	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	80	5.901.260.000	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak daerah	Bapenda	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	80	5.901.260.000	
						Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2	Bapenda	Jumlah Capaian Penerimaan PBB-P2	95.680.000.000	2.417.166.184	
						Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya	Bapenda	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	251.888.000.000	1.805.748.303	
						Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan Administrasi penerimaan Pajak daerah	527	1.678.345.513	
5	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	Bapenda	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	4	3.950.100.000	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	Bapenda	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	4	3.950.100.000	
						Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan pajak Daerah lainnya	Bapenda	Nilai potensi pajak daerah Lainnya	188.414.720.000	1.870.000.000	
						Peningkatan Pendataan/penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB	Bapenda	Nilai Potensi PBB-P2 dan BPHTB	173.056.000.000	1.090.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	Bapenda	- Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung	6650	990.000.000	
								- Jumlah Jenis Ketetapan pajak Daerah	588.444		

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4

(Tabel T-C.32. dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB.MOJOKERTO

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Prospek kondisi ekonomi tahun 2010 – 2014 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2009 yang mencapai 4,21%, tingkat inflasi sampai dengan Oktober 2009 sebesar 2,99% dan indikator-indikator ekonomi lainnya yang menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia relatif stabil.

Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dan sekaligus meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan

investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian intensif berupa stimulus perpajakan. Upaya penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemberian intensif fiskal pada program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan terbarukan khususnya energi panas bumi.

3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan misinya dalam ***"Membangun Kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata"***, maka ditetapkan tujuan untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran triwulan atau bulanan. Adapun sasaran dalam Rencana Kerja Tahun 2020 ialah ***"Optimalisasi Penerimaan PAD"***.

3.3. Program Dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah.

Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bapenda

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapenda.

b) Pengelolaan Administrasi Keuangan Bapenda

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan administrasi keuangan Bapenda.

c) Ketatausahaan dan Kepegawaian Bapenda

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Bapenda.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah Persentase capaian penerimaan PAD.

Kegiatan :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pajak daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Capaian pajak daerah

3. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD

Pencapaian kinerja Program **Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD** adalah Persentase Peningkatan Potensi PAD.

Kegiatan :

- a. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Potensi Pendapatan Asli Daerah

- b. Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah yang ditingkatkan dan Laporan PAD

- c. Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah wajib Pajak Daerah yang diperiksa/dimonitoring

4. Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak daerah

Pencapaian kinerja Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Kegiatan :

- a. Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Capaian Penerimaan PBB-P2.

b. Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.

c. Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah laporan Administrasi penerimaan Pajak daerah

5. Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah

Pencapaian kinerja Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah adalah Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah

Kegiatan :

a. Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan pajak Daerah lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Potensi Pajak Daerah lainnya.

b. Peningkatan Pendataan/penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Potensi PBB-P2 dan BPHTB.

c. Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung

Tabel 3.1
(Tabel T.C.33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan								
4.01 . 4.04.08	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Capaian Penerimaan PAD	Bapenda	100%	16.524.668.069	Dana Daerah		100%	18.177.134.875
4.01 . 4.04.08 . 01	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah	Persentase indikator program Badan Pendapatan Daerah	Bapenda	100%	6.390.507.656	Dana Daerah		100%	7.029.558.421
4.01 . 4.04.08 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bapenda	Jumlah Dokumen	Bapenda	7 Dokumen	60.000.000	Dana Daerah		7 Dokumen	66.000.000
4.01 . 4.04.08 . 01 . 02	Pengelolaan Administrasi Keuangan bapenda	Jumlah Laporan	Bapenda	181 laporan	50.000.000	Dana Daerah		181 laporan	55.000.000
4.01 . 4.04.08 . 01 . 10	Ketatausahaan dan Kepegawaian Bapenda	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Bapenda	12 Dokumen	6.280.507.656	Dana Daerah		12 Dokumen	6.908.558.421
4.04 . 4.04.08 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Capaian Pajak Daerah	Bapenda	100	760.500.000	Dana Daerah		100	836.550.000

4.04 .4.04.08 .17 . 64	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pajak daerah	Jumlah Potensi pajak daerah	Bapenda	347.568.000.000,-	760.500.000	Dana Daerah		361.470.720.000,-	836.550.000
4.04 .4.04.08 . 24	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Potensi PAD	Bapenda	2 %	1.654.373.300	Dana Daerah		100 %	1.819.810.630
4.04 .4.04.08 .24 . 01	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah - Jumlah peraturan pajak yang disempurnakan	Bapenda	586.592.790.833,- 2 Peraturan	508.630.000	Dana Daerah		610.056.502.466,- 2 Peraturan	559.493.000
4.04 .4.04.08 .24 . 04	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	- Jumlah sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah yang ditingkatkan - Jumlah laporan administrasi penerimaan PAD	Bapenda	7 Aplikasi 64 laporan	765.900.000	Dana Daerah		7 Aplikasi 64 laporan	842.490.000
4.04 .4.04.08 .24 . 05	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak Daerah yang diperiksa/dimonitoring	Bapenda	50	379.843.300	Dana Daerah		50	417.827.630
4.04 .4.04.08 . 25	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	80	5.525.660.713	Dana Daerah		80	6.078.226.784
4.04 .4.04.08 .25 . 01	Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2	Jumlah Capaian Penerimaan PBB-P2	Bapenda	95.680.000.000	2.326.355.900	Dana Daerah		99.507.200.000	2.558.991.490
4.04 .4.04.08 .25 . 02	Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	Bapenda	251.888.000.000	1.701.092.300	Dana Daerah		261.963.520.000	1.871.201.530
4.04 .4.04.08 .25 . 03	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan Administrasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	527	1.498.212.513	Dana Daerah		527	1.648.033.764

4.04 .4.04.08 . 26	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	Bapenda	4	2.193.626.400	Dana Daerah		4	2.412.989.040
4.04 .4.04.08 .26 . 01	Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan pajak Daerah lainnya	Nilai potensi pajak daerah Lainnya	Bapenda	188.414.720.000	1.489.225.000	Dana Daerah		195.951.308.800	1.638.147.500
4.04 .4.04.08 .26 . 03	Peningkatan Pendataan/penilaian PBB- P2 dan Pengelolaan BPHTB	Nilai Potensi PBB-P2 dan BPHTB	Bapenda	173.056.000.000	220.167.500	Dana Daerah		179.978.240.000	242.184.250
4.04 .4.04.08 .26 . 04	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	- Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung - Jumlah Ketetapan pajak Daerah	Bapenda	6650 Wajib pajak 588.444Obyek Pajak	484.233.900	Dana Daerah		6650 Wajib Pajak 588.444Obyek pajak	532.657.290

BAB IV.

**RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET	SATUAN		
1	4.01 .4.04.08 . 01	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah	-	-	Persentase indikator program Badan Pendapatan Daerah	Porsentase Capaian Penerimaan PAD	100	%	Bapenda	6.390.507.656
1	4.01 .4.04.08 .01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bapenda	1	B	Jumlah Dokumen	Persentase realisasi anggaran Bapenda	7	Dokumen	Bapenda	60.000.000
2	4.01 .4.04.08 .01 . 02	Pengelolaan Administrasi Keuangan bapenda	2	B	Jumlah Laporan	Indeks Profesionalitas ASN Bapenda	181	Laporan	Bapenda	50.000.000
						Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan Bapenda	71	%		
3	4.01 .4.04.08 .01 . 10	Ketatausahaan dan Kepegawaian Bapenda	3	B	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Persentase realisasi anggaran Badan Pendapatan daerah	12	Dokumen	Bapenda	6.280.507.656
2	4.01 .4.04.08 .17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Tingkat Capaian Pajak Daerah	Porsentase Capaian Penerimaan PAD	100	%	Bapenda	760.500.000
1	4.01 .4.04.08 .17 . 64	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pajak daerah	4	L	Jumlah Capaian Pajak daerah	Tingkat Capaian Pajak Daerah	347.568.000.000,-	Milyar	Bapenda	760.500.000

3	4.04 .4.04.08 . 24	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	-	-	Persentase Peningkatan Potensi PAD	Porsentase Capaian Penerimaan PAD	2	%	Bapenda	1.654.373.300
1	4.04 .4.04.08 .24 . 01	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	L	- Jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Potensi PAD	586.592.790.833,-	Milyar	Bapenda	508.630.000
					- Jumlah peraturan pajak yang disempurnakan		2	Peraturan		
2	4.04 .4.04.08 .24 . 04	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	6	L	-Jumlah sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah yang ditingkatkan	Persentase Peningkatan Potensi PAD	8	Aplikasi	Bapenda	765.900.000
					-Jumlah laporan administrasi penerimaan PAD		64	Laporan		
3	4.04 .4.04.08 .24 . 05	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	7	L	Jumlah wajib Pajak Daerah yang di periksa/dimonitoring	Persentase Peningkatan Potensi PAD	50	WP	Bapenda	379.843.300
4	4.04 .4.04.08 . 25	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak daerah	-	-	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Porsentase Capaian Penerimaan PAD	80	%	Bapenda	5.525.660.713
1	4.04 .4.04.08 .25 . 01	Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2	8	L	Jumlah Capaian Penerimaan PBB-P2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	95.680.000.000	Milyar	Bapenda	2.326.355.900
2	4.04 .4.04.08 .25 . 02	Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya	9	L	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	251.888.000.000	Milyar	Bapenda	1.701.092.300
3	4.04 .4.04.08 .25 . 03	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	10	L	Jumlah laporan Administrasi penerimaan Pajak daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	527	laporan	Bapenda	1.498.212.513
5	4.04 .4.04.08 . 26	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah			Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	Porsentase Capaian Penerimaan PAD	4	%	Bapenda	2.193.626.400
1	4.04 .4.04.08 .26 . 01	Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan pajak Daerah lainnya	11	L	Nilai potensi pajak daerah Lainnya	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	188.414.720.000	Milyar	Bapenda	1.489.225.000

2	4.04 .4.04.08 .26 .03	Peningkatan Pendataan/penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB	12	L	Nilai Potensi PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	173.056.000.000	Milyar	Bapenda	220.167.500
3	4.04 .4.04.08 .26 .04	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	13	L	- Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	6650	WP	Bapenda	484.233.900
					- Jumlah Ketetapan pajak Daerah		588.444	Obyek Pajak		
JUMLAH										16.524.668.069

BAB V.

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 5 (lima) Tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Mojokerto serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016-2021 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja PD untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran tanggungjawab / tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Rancangan Akhir RENJA Badan Pendapatan Daerah ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Mojokerto, Agustus 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 1990031011

